



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/06/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) NASIONAL
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan MDGs seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, Sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2005-2009 serta Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang fokus pada berbagai kebijakan dan program untuk menciptakan keadilan sosial serta kesetaraan kualitas standar pelayanan sosial;
- b. bahwa upaya dalam mencapai target MDGs perlu ditangani secara sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) NASIONAL PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) terdiri atas Tim Pengarah, dan Tim Teknis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada kelompok kerja mengenai substansi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Kelompok Kerja bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim teknis MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh tim pengarah;
- d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun laporan akhir penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

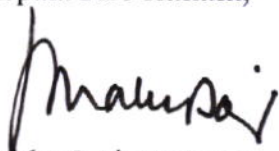
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delthy S. Simatupang', is written over the printed name.

Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/06/2010
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) NASIONAL
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

- A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. TIM PENGARAH
- a. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Sekretaris : Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Anggota :
1. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 10. Deputy ...

10. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
12. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
14. Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
15. Deputi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
16. Sekretaris Utama, BKKBN;
17. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
18. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
19. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
20. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

d. Kelompok Kerja

a) Pokja Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. |
| Sekretaris | : | Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas; |

3. Direktur ...

3. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Bina Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, BPS;
7. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS;
8. Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kasubdit Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kasubdit Evaluasi Kinerja Pembangunan Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas;

Tim Pendukung : 1. Karim, S.Ant, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Inti Wikanestri, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

b) Pokja Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua

Ketua : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
Sekretaris : Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional;

4. Direktur ...

4. Direktur Pembinaan TK/SD, Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Direktur Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Kasubdit Pendidikan Menengah dan Non Formal, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Agama, Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Pendukung :

1. Dr. Sanjoyo, M.Ec, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Endang Sulastri, S.Sos, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.

c) Pokja Tujuan 3 : Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Ketua : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Deputi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretaris : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Asisten Deputi Gender dalam Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Asisten Deputi Gender dalam Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Asisten Deputi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Direktur Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;
8. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama;
9. Direktur Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik, Kementerian Dalam Negeri;
10. Kasubdit Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Pengembangan Kekayaan Budaya, Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Pendukung : 1. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Direktorat Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Renova Glory Montesory Siahaan, SE, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;

d) Pokja Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Anak

Ketua : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Imunisasi dan Karantina, Kementerian Kesehatan;

3. Kepala Biro Perencanaan dan Ortala, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS;
5. Kasubdit Kesehatan Perorangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Pendukung : Ardhiantie, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

e) Pokja Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Ketua : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN;
4. Direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN;
5. Kasubdit Sumber Daya Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Keluarga Berencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Pendukung :

1. Dani Ramadan, S.Si, MHR, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Qurrota A'yun, S.Si, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

f) Pokja Tujuan 6 : Mencegah Penularan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)

Ketua : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris ...

- Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, BPOM;
5. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS;
6. Kasubdit Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Tim Pendukung : Dewi Amila Solikha, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- g) Pokja Tujuan 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
- Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup;
7. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
8. Direktur Pengembangan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Direktur Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perumahan Rakyat;
12. Direktur Konservasi Kawasan, Kementerian Kehutanan;
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
15. Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kasubdit Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kasubdit Kesehatan Perorangan, Kementerian PPN/Bappenas;

Tim Pendukung : 1. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Ira Lubis, ST, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Nur 'Aisyah Nasution, ST, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Erik Armundito, ST, MT, Direktorat Lingkungan Hidup, Kemneterian PPN/Bappenas.

h) Pokja Tujuan 8 : Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Strategi dan Portofolio Utang, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, BKPM;
8. Kasubdit Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Non APBN, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Kasudit Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

- Tim Pendukung :
1. Maliki, ST, MSIE, Ph.D, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Wulandari, SE, AK, MPP, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Sugeng Wahyu Hendarto, ST, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang